

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2014**

ABSTRAK	:	a.	<p>1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 170/04/KEP.DPRD/BOLMUT/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.</p>
		b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 12 Tahun 1985, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 10 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 20 Tahun 2001, PP Nomor 65 Tahun 2001, PP Nomor 66 Tahun 2001, PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 54 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 57 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 69 Tahun 2010, PP Nomor 71 Tahun 2010, Perpres Nomor 5 Tahun 2010, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, Permendagri Nomor 44 Tahun 2007</p>
		c.	<p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Uraian Laporan Realisasi Anggaran 4. Neraca 5. Laporan Arus Kas 6. CaLK 7. Penjabaran Lebih Lanjut
Catatan	:	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Boroko pada tanggal 15 September 2014</p>	

PERUBAHAN APBD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2014

ABSTRAK	:	a.	<p>1. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 235 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 170/05/KEP.DPRD/BOLMUT/X/2014 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tentang Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014</p>
		b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 12 Tahun 1985, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 10 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 24 Tahun 2011, PP Nomor 20 Tahun 2001, PP Nomor 65 Tahun 2001, PP Nomor 66 Tahun 2001, PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 32 Tahun 2005, PP Nomor 54 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 57 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 69 Tahun 2010, PP Nomor 71 Tahun 2010, Perpres Nomor 5 Tahun 2010, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, Permendagri Nomor 44 Tahun 2007</p>
		c.	<p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 2. Penjelasan Pendapatan Daerah 3. Penjelasan Belanja Daerah 4. Penjelasan Pembiayaan Daerah 5. Uraian Lebih Lanjut APBD 6. Penjabaran Lebih Lanjut 7.
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Boroko pada tanggal 22 Oktober 2014	